



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP) . 2020**





KATA PENGANTAR

Puji syukur di ucapkan kehadirat Allah S.W.T, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 dapat di selesaikan. LKJIP Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti Tahun 2020 sebagai laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kinerja berdasarkan Rencana Strategis, yang mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016-2021.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 ini merupakan Implementasi dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dibuat berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP, serta Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Terkait dengan siklus akuntabilitas, dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020 perludiketahui sampai sejauh manacapaian keberhasilan diantara kegagalan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti mempertanggung jawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun sebagai tugas,





wewenang, amanah, dan sumberdaya yang telah dimanfaatkan, yang dituangkan dalam media pertanggungjawaban berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pada laporan ini, diuraikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Tahun 2020 yang telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Pengukuran Kinerja Tahun 2016-2021 dengan beberapa indikator kinerja yang dilengkapi dengan bobot masing-masing. Dengan demikian diharapkan akan terlihat program dan kegiatan yang perlu diperbaiki dan dipertahankan atau ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Selatpanjang, Januari 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Dr. H. AREADY, SE., M. Si

Pembina Utama Muda IVc

NIP. 19750302 200212 1 004





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2020	11
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020	11
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Jabatan Tahun 2020	12
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Masa Kerja Tahun 2020	13
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Usia Tahun 2020	13
Tabel 1.6	Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020	14
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020	39
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020	42
Tabel 3.3	Kategori Pencapaian Indikator Sasaran	43
Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Sasaran 1	44
Tabel 3.5	Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang dihasilkan	47
Tabel 3.6	Persentase Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyediaan Pelabuhan yang Aman dan Selamat	49





Tabel 3.7 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Akses antar Pulau dan Daerah yang Aman dan Selamat.....	52
Tabel 3.8 Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang dihasilkan	54
Tabel 3.9 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akses Antar Pulau dan Antar Daerah yang Aman dan Selamat.....	56
Tabel 3.10 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur.....	59
Tabel 3.11 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pengamanan Arus Lalu Lintas.....	60
Tabel 3.12 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur.....	62
Tabel 3.13 Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020	77
Tabel 3.14 Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020	78
Tabel 3.15 Penyerapan Anggaran Pada Setiap Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti 2016-2021	79





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti

Tahun 2020 11





DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	i
DAFTAR ISI	iv
KATA PENGANTAR	v
IKHTISAR EKSLUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LatarBelakang.....	1
1.2 GambaranUmum.....	2
1.3 LandasanHukum.....	5
1.4 MaksuddanTujuan	7
1.5 TugasPokokdanFungsi.....	8
1.6 StrukturOrganisasi.....	9
1.7 SistematikaPenulisan.....	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	17
2.1 RPJMD 2016-2021.....	18
2.2 RencanaStrategis (RENSTRA) DinasPerhubunganTahun 2016-2021	24
2.3 PenetapanKinerjaTahun 2020.....	33
BAB III AKTUALISASI NILAI DASAR	36
3.1KerangkaPengukuranKinerja.....	36
3.2 CapaianIndikatorKinerjaUtama.....	39
3.3 PengukurandanAnalisaCapaianKinerjaSasaranStrategis.....	41
BAB IV PENUTUP	81
4.1 Kesimpulan.....	81
4.2 Saran.....	82





BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Perhubungan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.





Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 GAMBARAN UMUM

Pembangunan daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan





yang akuntabel (*Good Governance*). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi-misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sesuai dengan semangat otonomi daerah.

Dari penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan berkeadilan serta memperhatikan potensi yang ada. Penyelenggaraan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana yang tertuang dan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dengan demikian otonomi memberikan kewenangan kepada daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah yang seluas-luasnya dan bertanggung jawab, termasuk penataan kelembagaan, serta mempertanggungjawabkan keuangan daerah.

Hal ini berkaitan dengan tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.





Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta .

Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inpres Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Atas dasar itulah, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) guna mengukur kinerja dan Dinas Perhubungan Kabupaten





Kepulauan Meranti, sebagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi.

1.3 LANDASAN HUKUM

Setiap organisasi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik, dan sistematis. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian Kinerja Instansi Pemerintah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi tersebut yang kemudian harus dipertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Pelaporan kinerja ini dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), didasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagai dasar hukumnya. Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;





6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
12. Permenpan Nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan.
13. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah,
14. Peraturan Bupati Nomor 88 tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti.





15. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Laporan Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah;

Sebagai penyempurnaan dari semua dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) , yaitu dengan Peraturan Bupati nomor 88 tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perhubungan kabupaten Kepulauan Meranti dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta dengan Surat Edaran Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2010 tentang penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2010.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Pemerintah memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai bagian integral dari siklus kinerja yang utuh. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki maksud dan tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai sarana evaluasi terhadap tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan/kegagalan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengemban tugas, wewenang dan tanggung jawab;
3. Sebagai alat untuk mengetahui dan memperbaiki/menyempurnakan kelemahan/kekurangan dalam pencapaian sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menjalankan tugas dan fungsinya;





4. Sebagai sarana pemantau dan peringatan dini terjadinya penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti;
5. Sebagai alat pembanding antara hasil yang dapat dicapai dan yang harus dicapai;
6. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan/penataan organisasi kepegawaian dan tatalaksana serta pengendalian sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

1.5 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 88 Tahun 2018, tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Uraian Tugas Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 88 Tahun 2018, tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kedudukan Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah:

” Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bidang perhubungan yang berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan.”.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan, penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah bidang perhubungan;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum





- bidang perhubungan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas bidang perhubungan;
 - 5) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas bidang perhubungan;
 - 6) Pelaksanaan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi bidang perhubungan.

1.6 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 88 Tahun 2018, tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Uraian Tugas Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan
 2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Program
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi :
 1. Seksi Lalu Lintas.
 2. Seksi Angkutan.
 3. Seksi Pengujian Sarana.
- d. Bidang Sarana, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana.
 2. Seksi Pengoperasian Prasarana.
 3. Seksi Perawatan Prasarana.
- e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, membawahi :





1. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan.
 2. Seksi Lingkungan Perhubungan.
 3. Seksi Keselamatan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

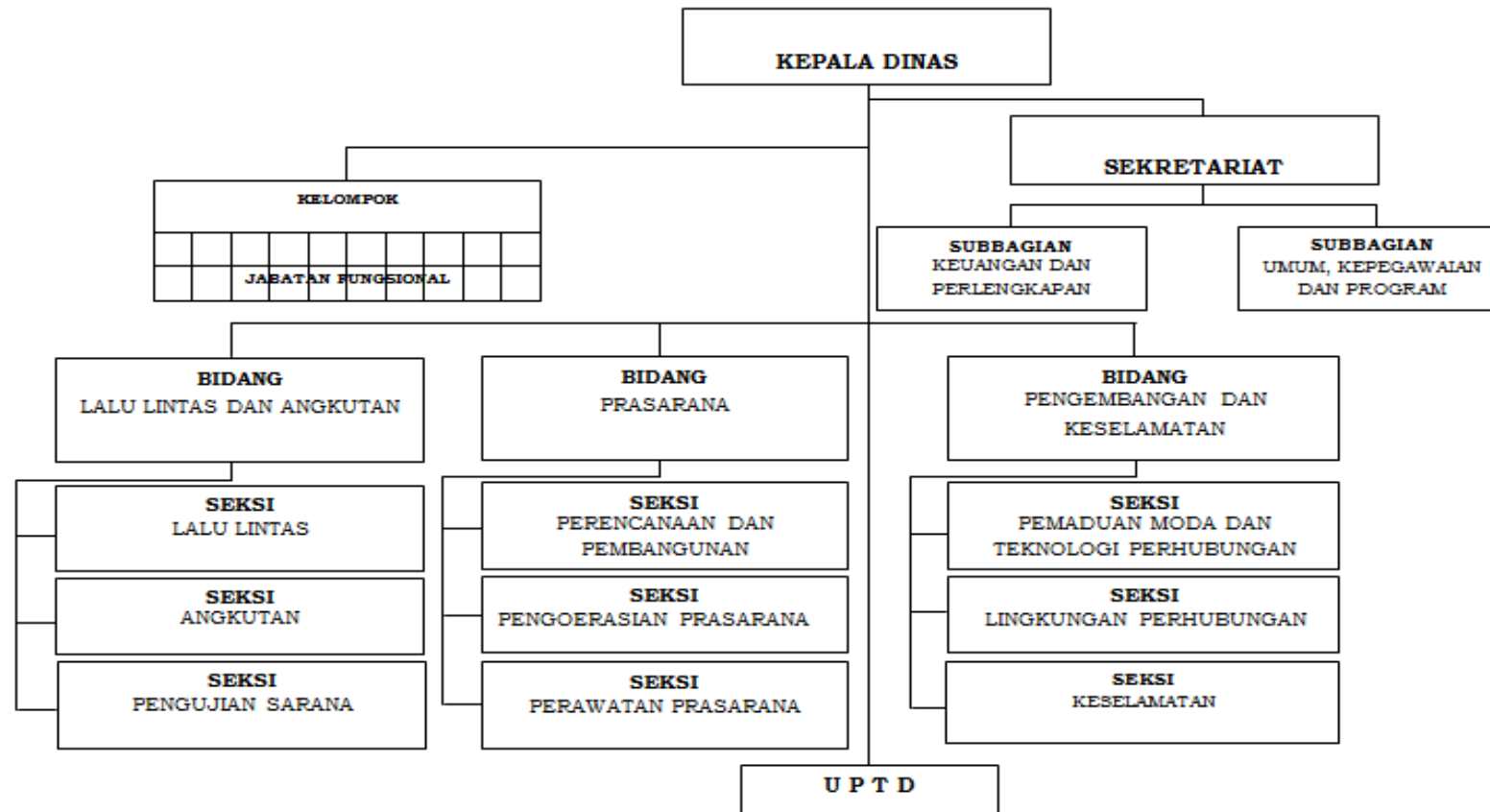
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020, berdasarkan Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No 88 Tahun 2018, Tentang Pembentukan Susunan , Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Seperti pada Gambar 1.1 berikut:





STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TPE B

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN
MERANTI
NOMOR .. TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI





1.6. KEPEGAWAIAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti, didukung dengan sumber daya Aparatur Sipil Negara, dibantu oleh Tenaga Sukarela (Honorar). Daftar jumlah pegawai Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel I.1
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2020

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Pegawai Negeri Sipil	42 Orang	35,38
2	Tenaga Honorar	84 Orang	64,62
Total		130 Orang	100

Dari Tabel 1.1 jumlah Aparatur Sipil Negara di Dinas Perhubungan tahun 2020 masih tergolong belum mencukupi, hal itu dapat terlihat dari banyaknya jumlah tenaga tambahan (Tenaga Honorar) sebanyak 84 Orang atau sebesar 64,62 %.

Dari sisi tingkat pendidikan, Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan sangat beragam. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 1.2:

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	2	3	4
1	S3	1 Orang	2,1
2.	PASCA SARJANA S-2	10 Orang	17,39



3	SARJANA S-1	15 Orang	43,47
4	DIPLOMA IV	2 Orang	4,2
5	DIPLOMA III	6 Orang	17,39
6	DIPLOMA II	1 Orang	2,1
7	SMA Sederajat	8 Orang	17,39
8	SMP Sederajat	-	-
9	SD	-	-
JUMLAH		42 Orang	100

Keterangan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2020 berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh ASN dengan latar belakang pendidikan S1 yaitu 17 orang atau sebesar 43,47%. Selanjutnya jika berdasarkan Golongan, Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan Tahun 2020 dapat dilihat dari Tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Jabatan Tahun 2020

NO	URAIAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	Eselon II	1	2,174
2	Eselon III	4	8,69
3	Eselon IV	16	34,783
4	Staf / Non Struktural	20	54,348
JUMLAH		46	100,00

Pada Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa jumlah pegawai berdasarkan Jabatandengan Eselon II sebanyak 1 Orang atau sebesar 2,1% Eselon III sebanyak 4 Orang atau sebesar 8,69%. Eselon IV sebanyak 16 Orang, dan Staf sebanyak 20 Orang atau sebesar



54,348%. Jika Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan di kelompokkan berdasarkan masa kerja, maka dapat dilihat dari Tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Masa Kerja Tahun 2020

No.	Masa Kerja Pegawai	Jumlah	Persentase (%)
1	2	3	4
1.	1 - 10 Tahun	18 Orang	45,65
2.	11 - 20 Tahun	18 Orang	39,13
3.	21 - 30 Tahun	2 Orang	4,34
4	31 - 40 Tahun	3 Orang	10,86
JUMLAH		46 Orang	100

Pada Tabel 1.4 dapat diketahui bahwa Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan didominasi oleh pegawai dengan masa kerja dibawah 1 - 10 tahun sebanyak 18 orang atau sebesar 45,65% hal ini juga mempengaruhi produktifitas kinerja Dinas Perhubungan. Jika Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan dikelompokkan berdasarkan usia dan Gender/Jenis Kelamin, dapat dilihat dari Tabel 1.5 dan Tabel 1.6, sebagai berikut:

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Usia Tahun 2020

No.	Umur Pegawai	Jumlah	Persentase (%)
1	2	3	4
1.	20 – 30 Tahun	4 Orang	10,87



2.	31 – 40 Tahun	18 Orang	45,65
3.	41 – 50 Tahun	9 Orang	23,92
4.	51 – 60 Tahun	10 Orang	19,56
JUMLAH		41 Orang	100

Tabel 1.6
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan
Meranti Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	0	3	4
1.	Laki – laki	39 Orang	89,13
2.	Perempuan	2 Orang	10,87
JUMLAH		41 Orang	100

Berdasarkan Tabel 1.5 diketahui bahwa, jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan didominasi oleh pegawai yang berusia 31 – 40 Tahun sebanyak 18 Orang atau sebesar 45,65 %. Dan dari Tabel 1.6 diketahui bahwa Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan didominasi oleh pegawai berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 39 Orang atau sebesar 89,13%.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti selama Tahun 2020. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2020 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja



(*performance agreement*) Tahun 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disajikan dalam bentuk data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis pada Tahun Anggaran 2020. Strategis disini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti, sementara dari sudut penganggaran disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan, tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang. Pembobotan dibuat masih sangat terbatas hanya dengan memperhatikan kontribusi kegiatan dalam penyerapan anggaran. Berdasarkan pembobotan tersebut dilakukan analisis perhitungan secara bobot tertimbang mengenai nilai capaian indikator kegiatan, program dan arah kebijakan.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas Gambaran Umum, Landasan Hukum, Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Kepegawaian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2011-2017



- Visi Kabupaten Kepulauan Meranti
- Misi Kabupaten Kepulauan Meranti
- 2. Rencana Strategis
 - Visi Dinas Perhubungan
 - Misi Dinas Perhubungan
 - Tujuan
 - Sasaran
- 3. Penetapan Kinerja Tahunan 2020

BAB III : KINERJA

1. Kerangka Pengukuran Kinerja
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja
3. Analisis Keuangan

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti No 88 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti maka Dinas Perhubungan diberikan tugas untuk Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perhubungan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan, penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah bidang perhubungan;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang perhubungan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas bidang perhubungan;
- 5) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas bidang perhubungan;
- 6) Pelaksanaan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi bidang perhubungan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Perhubungan berpedoman pada:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2016
2. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan 2010-2016
3. Penetapan Kinerja Tahun 2019



A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021, acuan utama yang digunakan adalah rumusan visi, misi, arah kebijakan dan rencana program indikatif Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti terpilih. Disamping itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga mengacu pada RPJP Nasional, RPJM Nasional, dan berbagai kebijakan maupun prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Tujuan merujuk pada semua dokumen perencanaan tersebut adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda.

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Implementasi substansi perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, telah membawa perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditandai dengan perubahan manajemen dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni dari manajemen Negara yang bercorak sentralistik ke arah manajemen masyarakat yang bercorak desentralistik, demokratis, partisipatif dan otonom.



Dokumen RPJMD merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, dimana program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan/kapasitas keuangan daerah. Dalam proses penyusunannya harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai suatu rencana kebijakan pembangunan diusahakan agar tetap sesuai dengan kondisi kekinian sehingga dapat diselaraskan dengan dinamika perubahan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti serta daerah sekitarnya, kondisi nasional dan internasional.

Dalam perkembangannya, perencanaan pembangunan nasional juga terus berlangsung perubahan dan perbaikan-perbaikan sistem perencanaan pembangunan, sehingga daerah perlu memperhatikan eksistensi dan substansi masing-masing daerah agar dapat mengimplementasikan berbagai instrumen yang ada secara

RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan rencana pembangunan dalam jangka lima tahunan adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan. Dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021, dapat digunakan sebagai dasar penilaian terhadap Kinerja Bupati dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan menjadi tolak ukur keberhasilan Bupati dalam menyusun dan memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akan



diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati yang nantinya diserahkan kepada DPRD.

a.1 Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Meranti

a.1.1 Visi Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis serta penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan, maka Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2016- 2021 adalah:

**“MENJADIKAN KEPULAUAN MERANTI SEBAGAI KAWASAN
NIAGA YANG MAJU DAN UNGGUL DALAM TATANAN
MASYARAKAT MADANI”**

Penetapanvisitersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juga mempertimbangkanberbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan *stakeholders* yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) tahun ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Di dalam Visi yang ditetapkan tersebut terdapat beberapa kalimat kunci yaitu **“Kawasan Niaga yang Maju dan Unggul”** dan **“Masyarakat Madani”**. Makna yang terkandung pada kalimat kunci tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. Kawasan Niaga yang Maju dan Unggul

Makna dari Kawasan Niaga yang Maju dan Unggul adalah sebuah kawasan yang dicirikan dengan dominannya peran sektor niaga yang berkembang pesat dan modern sebagai lokomotif pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Munculnya ide kawasan



niaga ini tidak terlepas dari historis Kota Selatpanjang yang dahulunya merupakan salah satu Bandar (kota) yang paling sibuk dan terkenal dengan perniagaan pada zaman kesultanan Siak. Sejak dahulu di Bandar ini telah dihuni oleh masyarakat yang heterogen, terutama suku Melayu dan Tionghoa yang membentuk kultur masyarakat yang harmonis diantaranya melalui kegiatan perniagaan. Faktor inilah yang kemudian menyuburkan perdagangan, mobilitas barang, jasa dan manusia yang datang maupun keluar daerah ini. Selain itu, posisi geografis daerah ini yang terletak di gerbang lintas batas negara dan jalur perdagangan internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga, sangat potensial menjadi kawasan niaga.

b. Masyarakat Madani

Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agama Islam yang merupakan agama mayoritas di wilayah ini dijadikan landasan norma kemasyarakatan untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memperhatikan dan menjaga kerukunan hidup dengan umat beragama lain.

a.1.2 Misi Kabupaten Kepulauan Meranti

Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. Sesuai dengan visi di atas maka dirumuskan misi dalam pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk periode 2016-2021, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembinaan mental spiritual dan nilai-nilai luhur Kebudayaan melayu dalam rangka mewujudkan masyarakat madani

Misi ini ingin menciptakan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi masyarakat yang religius, berakhlak mulia,



bermoral, memiliki toleransi yang tinggi serta menjaga kerukunan antar umat beragama.

2. Mewujudkan kawasan niaga

Misi ini merupakan manipestasi dari keinginan masyarakat yang ingin mencapai terwujudnya kawasan niaga.

3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat

Misi ini ingin mewujudkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, berkarya, inovatif, kompetitif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta sehat jasmani dan rohani.

4. Mewujudkan birokrasi pemerintahan daerah yang bersih, efektif dan efisien.

Misi ini ingin mewujudkan Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi pemerintahan yang profesional dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang handal, transparan dan akuntabel, terpercaya dalam memberikan pelayanan, sistem yang modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

5. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan potensi daerah.

Misi ini ingin menjadikan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang sejahtera, maju dan mandiri dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan meningkatkan produk unggulan daerah.

6. Meningkatkan infrastruktur dasar dan optimalisasi penataan ruang

Misi ini ingin mewujudkan peningkatan aksesibilitas dengan penyediaan infrastruktur dasar serta meningkatkan



konektivitas inter dan antar pulau. Misi ini juga ingin mencapai optimalisasi dalam pemanfaatan penataan ruang di Kabupaten Kepulauan Meranti.

7. Meningkatkan standar kualitas lingkungan hidup

Misi ini ingin mewujudkan peningkatan standar kualitas lingkungan hidup dengan mengedepankan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*, nilai-nilai yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan visi misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti secara berkelanjutan, mencakup beberapa prinsip sebagai berikut:

- i. Efektivitas dan efisiensi, dimana proses produksi dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan dan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin
- ii. Fasilitasi kepentingan publik untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dimana setiap warga masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik langsung maupun melalui intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya
- iii. Transparansi, dimana ada kebebasan (yang bertanggungjawab) dalam menerima dan mengirim informasi secara langsung, terutama informasi yang menjadi kepentingan publik
- iv. , dimana para pembuat keputusan, baik di lembaga pemerintahan maupun di masyarakat, bertanggungjawab kepada publik dan lembaganya secara *legitimate*
- v. Sikap yang responsip, dimana semua warga masyarakat bertanggungjawab terhadap proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga ke evaluasi.



- vi. Visi strategis, dimana para pemimpin dan warga masyarakat mempunyai pandangan yang luas dan jauh ke depan dalam pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah
- vii. Pemberdayaan masyarakat, pembangunan fokus pada kegiatan untuk menghasilkan pemberdayaan masyarakat
- viii. Penyediaan cadangan dalam bentuk tabungan masyarakat, dimana semua warga masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam memanfaatkan cadangan yang tersimpan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Melalui penerapan nilai-nilai diatas, pengembangan potensi dan kapasitas ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pelaksanaan visi dan misi diatas akan menjadi langkah yang strategis. Hal ini yang hanya mungkin dicapai bila nilai-nilai di atas terserap sebagai pola budaya lokal (*local culture*), sedemikian rupa sehingga dapat menjadi kekuatan moral bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kekuatan ini selanjutnya menjadi modal dasar bagi pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika perkembangan masyarakat secara arif dan berkelanjutan.

B. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021

Rencana strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul.



Perencanaan strategis adalah metode untuk menggunakan secara bersama-sama antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal agar dapat melakukan suatu perubahan yang sangat berarti. Perencanaan strategis menekankan pada kerangka dalam menghadapi masa depan dengan tetap memperhatikan peluang ataupun kesempatan baru. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan keuntungan dan manfaat dari peningkatan keberhasilan organisasi.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti menggunakan metode *Deskriptif* dan *Induktif/Analitik* dengan melakukan diskusi *internal*, serta memanfaatkan informasi dan *study literature*. Dalam garis besar dapat disampaikan bahwa Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti secara *implisit* didalamnya terjabarkan mengenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang cukup realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen renstra ini perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

b.1.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah, dalam hal ini adalah periode RPJMD Tahun 2016-2021. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan



arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan isu-isu strategis, maka Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti yang ingin diwujudkan pada periode 2016 - 2021 adalah:

”Menjadikan Kepulauan Meranti sebagai Kawasan Niaga yang Maju dan Unggul dalam Tataan Masyarakat yang Madani”

Misi Kabupaten Kepulauan Meranti:

Sesuai dengan visi “Menjadikan Kepulauan Meranti sebagai ***”Kawasan Niaga yang Maju dan Unggul dalam Tataan Masyarakat yang Madani”***, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti 2016 – 2021 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut:

MENJADIKAN KEPULAUAN MERANTI SEBAGAI KAWASAN NIAGA YANG MAJU DAN UNGGUL DALAM TATANAN MASYARAKAT MADANI	Meningkatkan pembinaan mental spiritual dalam rangka mewujudkan masyarakat Madani
	Mewujudkan kawasan niaga
	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.
	Mewujudkan birokrasi pemerintahan daerah yang bersih, efektif dan efisien.
	Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan potensi daerah.
	Meningkatkan infrastruktur dasar dan optimalisasi penataan ruang.
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.



Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini ditunjukkan melalui:

a. Pernyataan misi ke 4: **Mewujudkan birokrasi pemerintahan daerah yang bersih, efektif dan efisien.**

Pada misi keempat ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti berperan dalam meningkatkan pelayanan pemerintah yang bersih, efektif dan efisien.

b. Pernyataan misi ke 6: **Meningkatkan infrastruktur dasar dan optimalisasi penataan ruang.**

Pada misi keenam ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti berperan dalam membangun konektivitas antar pulau dan antar Daerah.

b.1.2 Tujuan dan Sasaran

Sasaran atau *objectivities* organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan koordinasi kebijakan strategis organisasi. Dengan itu perlu disusun secara konsisten rumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, maka



diharapkan tujuan strategi terkait juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran beserta indikatornya sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Tujuan	Sasaran	Indikator/Tujuan Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Membangun Konektivitas antar pulau dan antar daerah	1.Meningkatnya penyediaan Prasarana Pelabuhan yang Aman dan Selamat	1.Persentase tersedianya pelabuhan RoRo-RoRO yang aman dan selamat	25%	50%	75%	100%	100%
			3. Persentase tersedianya pelabuhan laut yang aman dan selamat	70,83%	75%	83,33%	91,67%	100%
		2.Meningkatnya Akses antar Pulau dan Antar Daerah yang aman dan selamat	1. Persentase tersedianya jaringan moda transportasi darat yang aman dan selamat	0%	0%	0%	50%	50%
			2. Persentase tersedianya jaringan moda transportasi laut yang aman dan selamat	70,83%	75%	83,33%	91,67%	100%
2	Meningkatkan Pelayanan Pemerintah yang baik	1.Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70%	75%	85%	85%	85%



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatkan pelayanan pelabuhan yang aman dan selamat	Persentase tersedianya pelabuhan Ro-Ro yang aman dan selamat	%	Persentase tersedianya pelabuhan Ro-Ro yang aman dan selamat merupakan sebuah tolok ukur untuk mengetahui Perencanaan Pembangunan Pelabuhan	<p>Cara Perhitungan : Pengukuran Persentase tersedianya pelabuhan Ro-Ro yang aman dan selamat adalah:</p> $\frac{\text{Jumlah Perencanaan Pelabuhan Ro-Ro pada tahun ini}}{\text{Jumlah Perencanaan Pelabuhan Ro-Ro yang direncanakan.}} \times 100\%$	DINAS PERHUBUNGAN	Pelabuhan Ro-Ro yang saat ini di Kabupaten Kepulauan Meranti belum semuanya berfungsi dengan baik sehingga perlu rehabilitasi dan pembangunan pelabuhan, dengan adanya rehabilitasi pelabuhan dan pembangunan pelabuhan akan meningkatkan kelancaran terhadap transportasi dan pengangkutan barang masuk dan keluar dari Kabupaten Kepulauan Meranti.
		Persentase tersedianya	%	Persentase tersedianya	<p>Cara Perhitungan : Pengukuran Persentase tersedianya pelabuhan laut yang aman dan selamat adalah dengan rumus sebagai</p>	DINAS PERHUBUNGAN	Persentase tersedianya pelabuhan laut yang aman dan



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
		pelabuhan laut yang aman dan selamat		elabuhan laut yang aman dan selamat sangat penting dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui jumlah Pelabuhan yang baik.	berikut : $\frac{\text{Jumlah Pembangunan Pelabuhan Laut}}{\text{Jumlah Pelabuhan yang dibutuhkan}} \times 100\%$		selamat ini merupakan kegiatan yang sangat dibutuhkan di Kabupaten Kepulauan Meranti ini, Mengingat Daerah ini lebih dominan menggunakan Transportasi Laut, maka dari itu dibutuhkan Pelabuhan yang baik untuk digunakan.
2.	Meningkatkan Akses Antar Pulau dan Antar Daerah yang aman dan selamat	Persentase tersedianya Jaringan Moda Transportasi darat yang aman dan selamat	%	Persentase tersedianya Jaringan Moda Transportasi darat yang aman dan selamat ini merupakan	Cara Perhitungan Pengukuran Persentase tersedianya Jaringan Moda Transportasi darat yang aman dan selamat adalah dengan rumus sebagai berikut : $\frac{\text{Jumlah Jaringan Moda Transportasi darat yang ada}}{\text{Jumlah Jaringan Moda transportasi Darat yang dibutuhkan}} \times 100\%$	DINAS PERHUBUNGAN	Tersedianya Jaringan Moda Transportasi darat yang aman dan selamat merupakan kegiatan yang sangat penting karena Transportasi merupakan alat penghubung suatu Daerah ke daerah lain, dengan adanya transportasi



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
				Kegiatan untuk mengetahui jumlah Angkutan Darat .			bisa melancarkan arus ekonomi suatu daerah.
		Persentase tersedianya jaringan moda transportasi laut yang aman dan selamat	%	Persentase tersedianya Jaringan Moda Transportasi laut yang aman dan selamat ini merupakan Kegiatan untuk mengetahui jumlah Angkutan Laut.	<p>Cara Perhitungan Pengukuran Persentase tersedianya Jaringan Moda Transportasi laut yang aman dan selamat adalah dengan rumus sebagai berikut :</p> $\frac{\text{Jumlah Jaringan Moda Transportasi laut yang ada}}{\text{Jumlah Jaringan Moda transportasi Laut yang dibutuhkan}} \times 100\%$	DINAS PERHUBUNGAN	Tersedianya Jaringan Moda Transportasi laut yang aman dan selamat merupakan kegiatan yang sangat penting karena Transportasi merupakan alat penghubung suatu Daerah ke daerah lain, dengan adanya transportasi bisa melancarkan arus ekonomi suatu daerah.
3	Meningkatkan Kinerja	IKM	%	IKM atau Indeks Kepuasan	<p>Cara Perhitungan : Pengukuran IKM atau Indeks Kepuasan Masyarakat dengan membuat kuisioner kepada masyarakat</p>	DINAS PERHUBUNGAN	Untuk peningkatan disiplin dan kualitas



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
	a dan Pelayanan Aparatur			san Masyarakat merupakan suatu penilaian dari masyarakat terhadap sebuah SKPD, dengan adanya IKM dapat memberikan gambaran tentang SKPD tersebut.	pengguna pelayanan dari SKPD.		manusia perhubungan diperlukan pelatihan dan bimtek, pelatihan dan bimtek dapat menjadikan seorang aparatur yang terampil dan professional .dibidangnya, dengan menjadikan seorang aparatur yang terampil dan professional dapat meningkatkan indeks kepuasan masyarakat di dalam pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

Pada anggaran perubahan, alokasi dana Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti terjadi penurunan dalam dokumen DPA. Dana APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 yang telah dianggarkan untuk Dinas



Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Alokasi dana anggaran murni yang tertuang didalam Dokumen DPA APBD dan disetujui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp 7.309.294.798,00 (*Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*). Dengan anggaran untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 4.943.706.759,00 (*Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*). Sedangkan untuk anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 2.365.588,039,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Enam puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).

APBD-P yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pada bulan Desember 2020 , alokasi dana untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu sebesar Rp. 6.804.226.836,00 (*Enam Milyar Delapan Ratus Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*). Dengan anggaran untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 4.007.938,797,00 (*Empat Milyar Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*.) Sedangkan untuk anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 2.796.288,039

(*Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Pulu Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).

Dalam rangka untuk mengoptimalkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti maka perlu dilakukan kegiatan yang sifatnya meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sehingga terciptanya hasil kerja yang efektif dan efisien. Program – program yang menjadi prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur



4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Dari Sembilan program pendukung kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti, maka kinerja yang diharapkan sesuai dengan Sasaran Renstra SKPD yaitu: Meningkatnya Pembangunan dan Revitalisasi Pelabuhan Rakyat/Pelabuhan Apung sebagai Penunjang Kelancaran Transportasi Air, Revitalisasi Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Transportasi Darat, serta Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan /pemberi amanah. Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban ber melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan Dinas Perhubungan.



3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

No	Persentase	Predikat	Kode Warna
1	2	3	4
1	< 100%	Tidak Tercapai	Red
2	= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Green
3	> 100%	Melebihi Target	Blue



Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	2	3	4
1	Sangat Baik	>90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2019 hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan



Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 090/341-Bag.Orpad/2014, telah ditetapkan 3 (Tiga) sasaran dengan 5 (Lima) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 090/341-Bag.Orpad tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021. Upaya untuk meningkatkan , Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
					n



1	2	3	4	5	6
1	Persentase tersedianya pelabuhan Ro-Ro yang aman dan selamat	%	100	100	100
2	Persentase tersedianya pelabuhan laut yang aman dan selamat	%	91,67	90	98.1
3	Persentase tersedianya jaringan moda transportasi darat yang aman dan selamat	%	50	0	0
4	Persentase tersedianya jaringan moda transportasi laut yang aman dan selamat	%	91,67	0	0
5	Nilai IKM	%	85	85,47	100,55

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- Indikator Rasio Persentase tersedianya pelabuhan Ro-Ro yang aman dan selamat, menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%, dari target 100%, dan realisasi sebesar 100%. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan pekerjaan sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati. Indikator Rasio Persentase tersedianya pelabuhan Ro-Ro yang aman dan selamat ini merupakan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mewujudkan peningkatan Sarana dan Prasarana di Bidang Perhubungan.



- Indikator Persentase tersedianya pelabuhan laut yang aman dan selamat menunjukkan capaian kinerja sebesar 98.1%, dengan realisasi 90%, dan target yang telah ditentukan sebesar 91,67%. Berdasarkan data yang diperoleh, Dinas Perhubungan telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Persentase tersedianya pelabuhan laut yang aman dan selamat ini merupakan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang pelabuhan laut. Tercapainya kinerja sebesar 98.1% ini merupakan kerjasama yang baik antara instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk kemajuan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk masa yang akan datang.

- Indikator Persentase tersedianya jaringan moda transportasi darat yang aman dan selamat. Dalam hal ini Indikator tersebut belum bisa dijalankan di tahun 2020, dan belum ditetapkan target pada tahun tersebut, dikarenakan kondisi Kabupaten Kepulauan Meranti yang belum memadai dibidang Transportasi darat. Dan kondisi Pelabuhan Ro-Ro yang lagi dalam masa proses pengerjaan di tahun 2019. Indikator ini bisa dijalankan setelah Ro-Ro Kabupaten Kepulauan meranti mulai beraktivitas, sehingga akses transportasi darat mengalami peningkatan dan membutuhkan moda transportasi darat yang aman dan selamat, dan Dinas Perhubungan telah menargetkan indikator ini pada tahun 2020 dan tahun 2021.

- Indikator Persentase tersedianya jaringan moda transportasi laut yang aman dan selamat, menunjukkan capaian kinerjanya 98.1%, dengan realisasi "90%" dari target "91.67%". ini menunjukkan kinerja Dinas Perhubungan mencapai target yang telah ditetapkan.

- Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indikator ini menunjukkan capain kinerja sebesar 100,55%, dengan realisasi sebesar 85,47%, dari target 85%. Ini menunjukkan kinerja Dinas Perhubungan dengan kegiatan Pengamanan / Pengaturan Lalu Lintas telah memuaskan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.



3.3 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016 - 2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 - 2021 sebanyak 3 (Tiga) sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun Keempat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan dengan 3 (Tiga) sasaran strategis dan 5 (Lima) indikator kinerja yang ditetapkan, maka pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase tersedianya pelabuhan Ro-Ro yang aman dan selamat	%	100	100	100
2	Persentase tersedianya pelabuhan laut yang aman dan selamat	%	91,67	90	98.1
3	Persentase tersedianya jaringan moda transportasi darat yang	%	50	0	0



	aman dan selamat				
4	Persentase tersedianya jaringan moda transportasi laut yang aman dan selamat	%	91,67	0	0
5	Nilai IKM	%	85	85,47	100,55

Dari 3 (Tiga) sasaran dengan 5 (Lima) indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
1	2	3	4
A.	Sasaran 1		
1	Melebihi/Melampaui Target	-	-
2	Sesuai Target	2	100
3	Tidak Mencapai Target	-	-
B.	Sasaran 2		
1	Melebihi/Melampaui Target	-	-
2	Tidak Target	2	60
3	Tidak Mencapai Target	-	-
C.	Sasaran 3		
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100,55
2	Sesuai Target	-	-
3	Tidak Mencapai Target	-	-



Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 5 indikator kinerja dari 2 tujuan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti 2016 - 2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

a. Sasaran I :Meningkatnya penyediaan Pelabuhan yang Aman dan Selamat.

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	Tahun 2021	%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase	%	75	75	100	100	100	100	100	100



	tersedianya pelabuhan Ro-Ro yang aman dan selamat									
2	Persentase tersedianya pelabuhan laut yang aman dan selamat	%	83,33	83,33	100	91,67	90	98.1	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja					100			100		100

Sasaran Meningkatnya penyediaan pelabuhan yang aman dan selamat dilihat dari 2 indikator : 1. Persentase tersedianya pelabuhan Ro-Ro yang aman dan selamat, 2. Persentase tersedianya pelabuhan laut yang aman dan selamat.

Capaian kinerja nyata indikator Persentase tersedianya pelabuhan Ro-Ro yang aman dan selamat adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 %, atau sesuai target yang ditentukan. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 capaian kinerja indikator Persentase tersedianya pelabuhan Ro-Ro yang aman dan selamat telah sesuai dengan target yang ditentukan, yakni target 75%, realisasinya 75% dan persentase capaian kerjanya adalah 100%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Perhubungan, maka capaian kerjanya harus mencapai 100% dari target yang ditentukan.

Capaian kinerja indikator 2 (dua) Persentase pelabuhan laut yang aman dan selamat, adalah sebesar 90 % dari target sebesar 91,67% yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2020, sehingga persentase capaian kerjanya adalah sebesar 98.1% atau mencapai target yang ditetapkan. jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja Persentase pelabuhan laut yang aman dan selamat mengalami peningkatan yaitu dari capaian kinerja sebesar 83,33% menjadi sebesar 83,33%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Perhubungan, maka capaian kerjanya harus mencapai 100% dari target yang telah ditentukan.



Tahun 2019 adalah tahun keempat renstra, capaian tahun 2020 sebesar 100 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perhubungan maka capaian kerjanya Harus mencapai 100% sehingga semua usulan kegiatan diakomodir dalam dokumen perencanaan.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya penyediaan pelabuhan yang aman dan selamat didukung oleh Program Dinas Perhubungan dengan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, Program pembangunan dermaga / pelabuhan, dan Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.5

Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No	Program		Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang/ Kurang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	1	Penyusunan DED/Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas	0	0		Menunjang
3	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1	Rehabilitasi / Pemeliharaan Pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Meranti	40.000.000	39.880.000	Terpiliharnya Pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Meranti	Menunjang



Keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya penyediaan pelabuhan yang aman dan selamat disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

- Faktor pendukung:
 1. Kesiapan sarana dan prasarana menjadi faktor penunjang dalam meningkatkan kinerja dengan indikator Persentase tersedianya pelabuhan Ro-Ro yang aman dan selamat.
 2. Kesiapan dari sumber daya manusia dalam bidang perhubungan juga sangat dibutuhkan dalam ini, karena selain sarana dan prasarana juga perlu disiapkan sumber daya manusia dalam bidang perhubungan yang ahli dibidangnya.

- Faktor Penghambat:

Kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang perhubungan sehingga tidak terpenuhi tenaga untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya penyediaan pelabuhan yang aman dan selamat, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.6

**Persentase Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya
Penyediaan Pelabuhan yang Aman dan Selamat**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Penyediaan Pelabuhan yang Aman dan Selamat	1.	Persentase tersedianya pelabuhan Ro-Ro yang aman dan selamat	%	100	100	100	1.	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	0	0	100
		2.	Persentase tersedianya	%	91,67	90	98.1	2.	Program pembangunan	0	0	100



			pelabuhan laut yang aman dan selamat					dermaga / pelabuhan			
							2.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Parasarana dan Fasilitas LLAJ	40.000.000	39.880.000	99,70
		RATA-RATA CAPAIAN DARI INDIKATOR					99,05	TOTAL PER SASARAN	40.000.000	39.880.000	99,70
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 0,65 %											
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 100,65 %											



Berdasarkan tabel 3.6 menunjukkan penilaian rata-rata capaian indikator dalam menunjang sasaran pertama (1) adalah 100%, yaitu kriteria penilaian realisasi kinerja yang tergolong kategori tinggi. Artinya pencapaian/realisasi kinerja capaiannya telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Tingkat efisiensi 0.65%, menunjukkan selisih persentase realisasi kinerja capaian sasaran Meningkatnya penyediaan pelabuhan yang aman dan selamat melebihi persentase dari realisasi anggaran. Selaras dengan tingkat efektifitas 100,65%, menunjukkan persentase capaian kinerja lebih besar jika dibandingkan persentase realisasi anggaran program kegiatan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya penyediaan pelabuhan yang aman dan selamat, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan partisipasi publik dalam pelaksanaan musrenbang dengan melibatkan lebih banyak unsur yang ada dimasyarakat
2. Perlu dilakukan penelaahan lebih dalam usulan kegiatan dari tingkat desa agar dapat dipetakan kegiatan prioritas yang paling dibutuhkan masyarakat.

b. Sasaran II : Meningkatnya Akses Antar Pulau dan Antar Daerah yang Aman dan Selamat

Pencapaian sasaran 2 (kedua) dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:



Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya akses antar pulau dan antar daerah yang aman dan selamat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	Tahun 2021	
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase tersedianya jaringan moda transportasi darat yang aman dan selamat	%	0	-	-	100	100	100	100	100
2	Persentase tersedianya jaringan moda transportasi laut yang aman dan selamat	%	83,33	83,33	100	91,67	90	98.1	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja					100			100		100



Sasaran Meningkatnya akses antar pulau dan antar daerah yang aman dan selamat dilihat dari 2 (dua) indikator : Persentase tersedianya jaringan moda transportasi darat yang aman dan selamat, dan Persentase tersedianya jaringan moda transportasi laut yang aman dan selamat.

Dari tabel 3.7 dapat diketahui bahwa Capaian kinerja nyata indikator 1 (pertama) Persentase tersedianya jaringan moda transportasi darat yang aman dan selamat belum dijalankan, dikarenakan akses jalan penghubung antar pulau belum memadai, direncanakan setelah selesai akses penghubung antar pulau atau Ro-Ro yang direncanakan sudah mulai aktif dijalankan barulah selanjutnya kita bangun jaringan moda transportasi daratnya. Maka dari itu untuk indikator ! (pertama) ini baru kita targetkan di tahun 2020 dan tahun 2021..

Capaian kinerja indikator 2 (dua) Persentase tersedianya jaringan moda transportasi laut yang aman dan selamat , adalah sebesar 90 % dari target sebesar 91,67% yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2020, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah sebesar 100% atau mencapai target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, capaian kinerja indicator Persentase tersedianya jaringan moda transportasi laut yang aman dan selamat sama – sama mencapai target yang ditentukan yakni sebesar 100%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Perhubungan, maka capaian kinerjanya harus mencapai 100% dari target yang telah ditentukan.

Keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya akses antar pulau dan antar daerah yang aman dan



selamat disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

- Faktor pendukung :
 1. Koordinasi yang baik antar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Kementerian Perhubungan yang berjalan dengan baik.
 2. Koordinasi yang baik antar bidang Dalam OPD Dinas Perhubungan sehingga capaian kinerja bisa berjalan dengan baik.
- Faktor Penghambat
 1. Belum adanya akses penghubung antar pulau yang baik.
 2. Kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang perhubungan sehingga tidak terpenuhi tenaga untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya akses antar pulau dan antar daerah yang aman dan selamat didukung oleh Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Output program dan kegiatan tersebut antara lain tersedianya jaringan moda transportasi yang aman dan selamat dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Gambaran tentang Program, Kegiatan, Pagu, Realisasi Anggaran, Output serta dampak terhadap Capaian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8

Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang dihasilkan

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang
----	---------	----------	---------------	--------------------	--------	-----------



						/Kurang
1	2	4	5	6	7	8
1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Pengamanan Hari Besar Keagamaan /Pengamanan Kegiatan	212.320.000	169.000.000	Jumlah penyelenggaraan hari besar keagamaan yang diamankan	Menunjang

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya akses antar pulau dan antar daerah yang aman dan selamat, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.9

**Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akses Antar Pulau
dan Antar Daerah yang Aman dan Selamat**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya akses antar pulau dan antar daerah yang aman dan selamat	1.1	Persentase tersedianya moda transportasi darat yang aman dan selamat	%	50	30	60	1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	212.320.000	169.000.000	76.10
		1.2	Persentase tersedianya moda transportasi laut yang aman dan selamat	%	91.67	0	0					



		RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR	60	TOTAL PER SASARAN	212.320.000	169.000.000	76.10
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 16.1%							
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 126.83%							



Berdasarkan tabel 3.9 menunjukkan penilaian rata-rata capaian indikator dalam menunjang sasaran kedua (2) yaitu sebesar 100%, yaitu kriteria penilaian realisasi kinerja yang tergolong kategori tinggi. Artinya pencapaian/realisasi kinerja sasaran Meningkatkan Akses antar Pulau dan Antar Daerah yang Aman dan Selamat capaian telah memenuhi target dan berada dalam persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Selain itu jika dilihat dari Tingkat efisiensi 16.1%, dan tingkat efektifitas sebesar 126.83%, dalam pencapaian sasaran kinerja, sasaran Meningkatkan Akses Antar Pulau dan Antar Daerah yang Aman dan Selamat telah efektif dan efisien karena capaian kinerjanya telah melebihi target dan realisasi anggaran program kegiatan yang menunjang sasaran lebih kecil dibandingkan realisasi capaian kinerja.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatkan akses Antar Pulau dan Antar Daerah yang Aman dan Selamat berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan lagi pengamanan arus pengamanan lalu lintas, dan bersosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengikuti aturan berlalu lintas, sehingga bisa mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.
2. Melakukan pengecekan terhadap dermaga/pelabuhan yang ada, sehingga dermaga/pelabuhan yang kita kelola layak pakai.

c. Sasaran III : Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Aparatur

Pencapaian sasaran ke - 3 (Tiga) dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:



Tabel 3. 10

Analisis Pencapaian Sasaran 3

Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Tahun 2020		%	Tahun 2021	%
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		Target	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	85	87,36	85	85,47	100,55	85	85
Rata-rata Capaian Kinerja				102,77			100,55		85

Sasaran Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur dapat dilihat dari 1 (satu) indicator, yaitu Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik

Tabel : Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.



Tabel. 3. 11
Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Pelayanan Pengamanan Arus Lalu Lintas

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1.	Persyaratan Pelayanan	3.6
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.36
3.	Waktu Penyelesaian	3.42
4.	Biaya/Tarif	3,59
5.	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3.3
6.	Kompetensi Pelaksana	3,5
7.	Perilaku pelaksana	3,32
8.	Penganganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,52
9.	Sarana dan Prasarana	3.38
Nilai Rata-rata Tertimbang		3,4188
IKM Konversi		85,47

Capaian kinerja nyata indikator indeks kepuasan masyarakat adalah 87,36 yang menunjukkan **Baik** sesuai dengan interval nilai indikator.



Capaian kinerja nyata indikator 5 (lima) Meningkatnya Kinerja Dinas Perhubungan Pelayanan untuk indikator indeks kepuasan masyarakat target adalah 85% dan capaian target adalah 85,47%, persentase SKPD yang sudah melaksanakan keterbukaan informasi public mempunyai target 100% dengan realisasi 85,47% sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 100%. Bila dibandingkan dengan tahun 2019 untuk indikator indeks kepuasan masyarakat mengalami peningkatan, dengan target 85%, capaian realisasinya 87,36%.

Tahun 2019 adalah tahun keempat renstra, capaian tahun 2020 dengan nilai B bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan maka capaian kinerjanya mencapai nilai A.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Dinas Perhubungan disebabkan faktor penghambat sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat

1. Mutasi pejabat
2. Terjadinya rasionalisasi anggaran yang menyebabkan terkendalanya kegiatan yang sudah direncanakan.
3. Masih kurangnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Dinas Perhubungan, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :





Tabel 3.12

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)	Program		Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	85	85,47	100,55	1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.011.968.039	1,796,201,860	88,75
		1.2						1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	318.000.000	316,883,000	99,55
		1.3						1.3	Program Peningkatan Disiplin	169.000.000	168,883,000	99,93



								Aparatur				
								1.4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0	0	0
								1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	45.000.000	44,694,500	99,32
RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR							100,55	TOTAL PER SASARAN	2,543,968,039	2,326,352,359	104.8	



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcam)/Kegiatan	Capaian Program (Outcam)/Kegiatan (Output) Tahun 2019	Capaian Program (Outcam)/Kegiatan (Output) Tahun 2020	Ket
----	------------------	---	---	---	-----

TINGKAT EFISIENSI 4.25%

TINGKAT EFEKTIFITAS 104.22%





		(Output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan perangkat pendukung pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100%	%				
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	%	100	41.67	100%	%				
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	59.19	100%	%				
c.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	%	100	97.20	100%	%				
d.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	%	100	87.86	100%	%				
e.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	%	100	63.51	100%	%				
f.	Penyediaan	Tersedianya	%	100	33.33	100%	%				



	Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor										
g.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	%	100	65.85	100%	%					
h.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	%	100	66.63	100%	%					
i.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Ke Luar Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Ke Luar Daerah	%	100	95.11	100%	%					
j.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	%	100	100	100%	%					
k.	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	%	100	100	100%	%					
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam						%	85	74.78	100%		



	dan Luar Daerah										
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran						%	85	91.67	100%	
	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran						%	85	99.82	100%	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100%	%				
a.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100%	94.53	100%	100				
b.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	%	100	100	100%	%				
c.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung	Terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan Gedung	%	100	100	100%	%				



	Kantor	Kantor										
d.	Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan	%	100	98.00	100%	%					
e.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kapal Pelayaran Rakyat	Terpeliharanya Rutin/Berkala Kapal Pelayaran Rakyat	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
f.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terehabilitasinya Sedang/ Berat Gedung Kantor	%	100	94.01	100%	%					
g.	Penyediaan Rumah Dinas/ Gedung Kantor	Tersedianya Rumah Dinas/ Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran							85	-			
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran							85	99.55	100%		
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	%	100	100	100%	%					



a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	%	100	99.84	100%	%				
b.	Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	Terselenggaranya kegiatan Hari-Hari Besar Nasional	%	100	98.10	100%	%	85	99.93	100%	
c.	Penyelenggaraan Hari Besar/Hari Ulang Tahun	Terselenggaranya kegiatan Hari Besar/Hari Ulang Tahun	%	100	100	100%	%				
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	100	100	100%	100	%				
a.	Penyusunan SAKIP OPD	Tersusunnya SAKIP OPD	100	14.72	100%	100	%				
b.	Penyusunan (LAKIP) OPD	Tersusunnya LAKIP OPD	100	51.62	100%	100	%				
c.	Penyusunan SISMONTEP-TEPRA	Tersusunnya SISMONTEP-TEPRA	100	42.23	100%	100	%				
b.	Penyusunan SPIP Dinas Perhubungan	Tersusunnya SPIP Dinas Perhubungan	100	25.50	100%	100	%				



	Penyusunan dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD							%	85	-		
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya							%				
a.	Diklat, Bimtek dan Sosialisasi Aparatur							%	85	99.32	100%	
6.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100	100	100%	100		%				
a.	Reviu DED Pelabuhan Ro-Ro Sagu Lukit Buton	Jumlah DED Pelabuhan Ro-Ro Sagu Lukit Buton	%					-	-	-	-	
b.	Penyusunan FS Sagu-sagu Lukit - Buton	Tersusunnya FS Sagu-sagu Lukit - Buton	-	-	-	-		-	-	-	-	
c	Penyusunan Rencan	Tersusunnya Rencan	-	100	99.61	100%		%				



	Induk Pelabuhan Penyeberangan Dakal Menuju Ketam Putih	Induk Pelabuhan Penyeberangan Dakal										
d	Penyusunan Rencan Induk Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Sari	Tersusunnya Rencan Induk Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Sari	-	100	99.61	100%	%					
e	Penyusunan UKL/UPL Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Sari	Tersusunnya UKL/UPL Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Sari	-	100	98.61	100%	%					
f	Penyusunan Rencan Induk Pelabuhan Penyeberangan Sagu- sagu Lukit	Tersusunnya Rencan Induk Pelabuhan Penyeberangan Sagu- sagu Lukit	-	100	99.61	100%	%					
g	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Desa Semukut	Terbangunnya Fasilitas Pelabuhan Desa Semukut	-	100	99.44	100%	%					
h	Reviu DED Pelabuhan Dorak	Jumlah DED Pelabuhan Dorak	-	100	99.68	100%	%					
i	Penyusunan Study Kelayakan Penyeberangan Dakal	Tersusunnya Study Kelayakan Penyeberangan Dakal	-	-	-	-	%					
	Penyusunan DED/Perencanaan						%	91,6	0	0%		
								7				



	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan										
7.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan	-	100	100	100%	%				
a.	Pengamanan Arus Mudik Lebaran/ Operasi Ketupat	Terselenggaranya Pengamanan Arus Mudik Lebaran/ Operasi Ketupat	%	100	100	100%	%				
b.	Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Terselenggaranya Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	-	-	-	-	-	-	-	-	
c.	Konsolidasi dan Sinergisitas Peningkatan Pelayanan Angkutan	Terselenggaranya Konsolidasi dan Sinergisitas Peningkatan Pelayanan Angkutan	-	-	-	-	-	-	-	-	
d.	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan	Terselenggaranya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana	-	-	-	-	-	-	-	-	



	Prasarana Perhubungan	dan Prasarana Perhubungan									
	Pengamanan Hari Besar Keagamaan/Pengamanan Kegiatan							50	76.16	100%	
8.	Program Pembangunan Dermaga / Pelabuhan		%	100	100	100%	%				
a.	Pembangunan Dermaga Desa Semukut Kecamatan Pulau Merbau (DAK)	Jumlah Dermaga Desa Semukut Kecamatan Pulau Merbau (DAK)	%	-	-	-	-				
b.	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Tanjung Samak	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Tanjung Samak	%	100	100	100%	%				
c.	Pembangunan Dermaga/Pelabuhan Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur	Jumlah Dermaga/Pelabuhan Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur yang dibangun	-	-	-	-	-	-	-	-	
d.	Pembangunan Pagar	Jumlah Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	



	Pelabuhan	Pelabuhan yang dibangun										
e.	Pengadaan dan Pemasangan Dholpin	Pengadaan dan Pemasangan Dholpin	%					-	-	-	-	
9.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Renovasi Lantai Pelabuhan Desa Penyagun Kecamatan Rangsang	Terselenggaranya Renovasi Lantai Pelabuhan Desa Penyagun Kecamatan Rangsang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan Kecamatan Tebing Tinggi Barat	Jumlah Terminal/Pelabuhan Kecamatan Tebing Tinggi Barat yang direhabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan Kecamatan Tebing Tinggi Timur	Jumlah Terminal/Pelabuhan Kecamatan Tebing Tinggi Timur yang direhabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



d.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan Kecamatan Rangsang Pesisir	Jumlah Terminal/Pelabuhan Kecamatan Rangsang Pesisir yang direhabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	
e.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan Kecamatan Pulau Merbau	Jumlah Terminal/Pelabuhan Kecamatan Pulau Merbau yang direhabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ										
	Rehabilitasi/pemeliharaan Pelabuhan Di Kabupaten Kepulauan Meranti							91.67	99.70	100%	



1.4 Akuntabilitas Keuangan

Pada anggaran perubahan, alokasi dana Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti terjadi penurunan dalam dokumen DPA. Dana APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 yang telah dianggarkan untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Alokasi dana anggaran murni yang tertuang didalam Dokumen DPA APBD dan disetujui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp. 7.309.294.798,00 (*Tujuh Miliar Tiga Ratus Sembilan Juta Dua Ratus sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*). Dengan anggaran untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 4.943.706.759,00 (*Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tujuh ratus lima Puluh sembilan Rupiah*). Sedangkan untuk anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar Rp 2.365.588.039,00 (*Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).

APBD-P yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pada bulan Desember 2020 , alokasi dana untuk Dinas *Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti* yaitu sebesar Rp. 6.804.226.836.00 (*Enam Miliar Delapan Ratus Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*). Dengan anggaran untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 4.007.938.797,00 (*Empat Milyar Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*). Sedangkan untuk anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar Rp 2.796.288.039,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).



Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Pagu dan Realisasi Anggaran
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2020

No.	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya penyediaan pelabuhanyang aman dan selamat	40.000.000	39.880.000	99,70
2	Meningkatnya Akses antar Pulau dan Antar Daerah yang aman dan selamat	212.320.000	169.000.000	76.16
3	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur	2,543,968,039	2,326,352,359	104.8
	Jumlah	2.796.288.039,00	2.527.807.359,00	740.92

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2020.



Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.14
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2020

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Sasaran 1	1			
1	Melebihi/Melampaui Target	-	-	39.880.000	99,70%
2	Sesuai Target	2	100%		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		
B.	Sasaran 2	2			
1	Melebihi/Melampaui Target	-	-	169.000.000	76.16%
2	Sesuai Target	2	100%		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		
C.	Sasaran 3	2			
1	Melebihi/Melampaui Target	1	102,77%	2,326,352,359	104.8%
2	Sesuai Target				
3	Tidak Mencapai Target	-	-		



Pencapaian Sasaran pada Tahun 2020 merupakan pencapaian kinerja tahun keempat Renstra 2016-2021, dengan demikian diuraikan pula capaian Sasaran berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut:

Tabel 3.15
Penyerapan Anggaran pada setiap Misi
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti 2016-2021

No.	Sasaran	Pagu Indikatif Renstra (Rp.)	Realisasi Anggaran tahun ke-2	% (dari Pagu Indikatif)
1.	Sasaran 1: Meningkatnya penyediaan pelabuhan yang aman dan selamat	40.000.000	39.880.000	99,70
2.	Sasaran 2: Meningkatnya Akses antar Pulau dan Antar Daerah yang aman dan selamat	212.320.000	169.000.000	76.16
3.	Sasaran 3: Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur	2,543,968,039	2,326,352,359	104.8



perhubungan.			
--------------	--	--	--

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja Tujuan organisasi.

BAB IV PENUTUP

IV. 1 KESIMPULAN

Secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dibebankan serta telah dapat memenuhi beberapa sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Dalam Tahun Anggaran 2020, Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti telah memenuhi kategori **Baik** sesuai dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan kegiatannya, untuk itu sangat disadari masih diperlukan perbaikan pada berbagai bidang untuk dapat meningkatkan kinerja yang telah dicapai oleh Organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah perwujudan kewajiban Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mencapai sasaran



dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut:

Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur yang sesuai antara pendidikan formal dengan bidang tugas yang diemban, khususnya dibidang teknis seperti Sarjana Teknik Sipil, Sarjana Teknik Informatika, Sarjana Transportasi (Maritim/Laut, Transportasi Darat dan ASDP) dll.

1. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur yang sesuai antara pendidikan formal dengan bidang tugas yang diemban, khususnya dibidang teknis seperti Sarjana Teknik Sipil, Sarjana Teknik Informatika, Sarjana Transportasi (Maritim/Laut, Transportasi Darat dan ASDP) dll.
2. Minimnya anggaran APBD yang dialokasikan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti bila dibandingkan besarnya beban tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam membangun infrastruktur transportasi yang aman dan selamat.
3. Minimnya sarana dan prasarana penunjang dan pendukung yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.
4. Tidak adanya tunjangan khusus yang diberikan kepada aparatur di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti.



IV.2 SARAN

Agar selalu dapat meningkatkan kinerja disamping mempertahankan yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam bentuk :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur yang sesuai antara pendidikan formal dengan bidang tugas yang diemban, melalui:
 - penerimaan PNS dengan kualifikasi pendidikan formal sebagaimana kebutuhan tersebut di atas;
 - pemberian kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Sarjana (S.1) dan Master (S.2) sebagaimana kebutuhan tersebut di atas, bagi PNS di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - pemberian kesempatan untuk mengikuti diklat – diklat teknis di bidang perhubungan;
2. Menambah alokasi anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti melalui sumber dana APBD yang dialokasikan untuk membangun infrastruktur transportasi yang aman dan selamat.
3. Perlunya pengadaan sarana dan prasarana penunjang dan pendukung sesuai kebutuhan guna menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Perlu dipertimbangkan untuk memberitunjangan khusus bagi aparatur di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini disebabkan karena tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai



salah satu sumber penerimaan PAD, regulator dan pelayanan dibidang transportasi.

Demikianlah hal-hal yang dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini untuk dimaklumi adanya dan terima kasih atas perhatiannya.

Selatpanjang, Januari 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Dr. H. AREADY, SE., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19750302 200212 1 004